

**YUDA B. TANGKILISAN**

## **Indonesia Mulia: Visi Dokter Soetomo tentang Kesejahteraan Rakyat, Moral Ekonomi, dan Modal Sosial**

**INTISARI:** Membicarakan cita-cita bangsa Indonesia tampaknya terasa klise dan seolah-olah berada di tengah-tengah lingkaran setan yang tidak berujung. Namun, sebagaimana amanat dan cita-cita perintis, pendiri, dan pejuang bangsa, maka semangat tidaklah boleh padam, apalagi menjadi pesimis dan apatis. Dokter Soetomo adalah seorang pemuda pendiri Budi Utomo pada tahun 1908, suatu organisasi sukarela modern yang memperjuangkan peningkatan harkat dan martabat masyarakat Jawa yang terjajah. Perjuangannya tidak hanya sebatas ranah politik dan sosial, melainkan juga merambah ke bidang ekonomi ketika beliau mendorong, menciptakan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari karya, kiprah, dan kinerja sosial-ekonominya tersirat visi dan gagasannya tentang pengembangan ekonomi. Visi ekonominya yang menarik dan signifikan untuk dikembangkan, dan relevan untuk keadaan masa kini, menyangkut persoalan kesejahteraan rakyat, moral ekonomi, dan modal sosial, sebagaimana yang dituangkannya dalam ungkapan “Indonesia Mulia”. Visi dokter muda Soetomo merupakan refleksi semangat dan kecenderungan perjuangan pada zamannya, yang berada di bawah belenggu kolonialisme Belanda untuk bangkit meraih dan mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang merdeka.

**KATA KUNCI:** Dokter Soetomo, pemuda, visi dan gagasan, Indonesia mulia, kesejahteraan rakyat, moral ekonomi, modal sosial, dan bangsa yang merdeka.

**ABSTRACT:** “Noble Indonesia: The Vision of Medical Doctor Soetomo on the People Welfare, Economic Moral, and Social Capital”. Talking about the ideals of the Indonesian people seem to feel cliché and as like as was in the middle of an endless vicious circle. However, as the mandate and ideals of pioneers, founders, and heroes of the nation-state, the spirit is not allowed to go out, let alone become pessimistic and apathetic. Medicine Doctor Soetomo is a youth who was the founder of “Budi Utomo” (Noble Character) in 1908, a modern voluntary organization that struggled for the social emancipation of colonized Javanese people. His struggle was not restricted in political and social fields, but also in economics to encourage, create, and increase people’s welfare. From his works, activities, and achievements imply his vision and thoughts for developing economics. His interesting and important economic vision deals with social welfare, economic moral, and social capital issues, that formulated in an idea of Noble Indonesia or “Indonesia Mulia”. The vision of young medical doctor Soetomo was such a reflection of the struggle spirit and trends of its age under a colonial chains to stand up achieving and making the dream comes true as a free nation.

**KEY WORD:** Medical doctor Soetomo, youth, vision and thought, noble Indonesia, people’s welfare, economic moral, social capital, and free nation.

### **PENDAHULUAN**

Membicarakan cita-cita bangsa Indonesia, di satu pihak, tampaknya terasa klise dan seolah-olah berada di tengah-

tengah lingkaran setan (*vicious circle*) yang tidak berujung. Namun, di pihak lain, sebagaimana amanat dan cita-cita perintis, pendiri, dan pejuang bangsa, maka semangat

**About the Author:** Dr. Yuda B. Tangkilisan adalah Dosen Senior di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (Universitas Indonesia), Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat email: [yebete@yahoo.com](mailto:yebete@yahoo.com)

**How to cite this article?** Tangkilisan, Yuda B. (2015). “Indonesia Mulia: Visi Dokter Soetomo tentang Kesejahteraan Rakyat, Moral Ekonomi, dan Modal Sosial” in *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, Vol.1(1) April, pp.9-22. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, APAKSI Bandung, and KEMENPORA RI Jakarta, ISSN 2407-7348. Available online also at: <http://sipatahoenan-journal.com/02-indonesia-mulia-visi-dokter-soetomo/>

**Chronicle of the article:** Accepted (January 14, 2015); Revised (March 2, 2015); and Published (April 21, 2015).

tidaklah boleh padam, apalagi menjadi pesimis dan apatis, walau keadaan dan kenyataan yang dihadapi seolah-olah tidak memberi harapan.

Setelah sekian lama merdeka dan telah melalui fase Reformasi, perkembangan bangsa dan negara terasa tidak bergerak ke arah yang didambakan, sebagaimana tercetus dan tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadaan perekonomian masyarakat dan negara masih terpuruk, bahkan dampak krisis ekonomi sejak tahun 1997/1998 belum sepenuhnya pupus dan terasa masih mempengaruhi kehidupan dan upaya untuk meraih kemajuan. Apalagi berbagai kasus korupsi dan kolusi terjadi di lingkungan politik dan ekonomi, sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan menggerus kepercayaan (*trust*) terhadap pemerintah. Sengkarut politik terakhir terjadi di sekitar penyelenggaraan PEMILU (Pemilihan Umum) legislatif beberapa waktu lalu, yang diwarnai berbagai kecurangan, melibatkan segelintir panitia penyelenggaranya.

Oase keadaan dan perkembangan nasional yang memprihatinkan itu tidaklah memadamkan semangat dan optimisme. Hartarto Sastrosoenarto, seorang patriot dan negarawan sejati yang pernah dimiliki bangsa Indonesia saat ini, menyatakan:

Visi pertama kita, yaitu meraih kemerdekaan, telah kita gapai. Bangsa kita juga telah melalui berbagai krisis dan ujian, baik yang berbentuk krisis ekonomi maupun politik, seperti krisis moneter 1997 dan berbagai upaya separatisme. Bahkan kini, kita telah memiliki dua modal yang amat kokoh bagi keberlanjutan pembangunan kita, yaitu demokrasi dan otonomi daerah. Perumusan visi kedua bangsa harus dilakukan secara luas, sehingga menjadi komitmen menyeluruh bangsa (Sastrosoenarto, 2006:95).

Keberadaan Indonesia yang merdeka dan berdaulat memiliki jejak-jejak sejarah yang merujuk kembali ke masa awal abad ke-20. Pada masa itu, perlawanan-perlawanan terakhir terhadap ekspansi cengkeraman penjajahan, yang telah berlangsung sejak

awal abad sebelumnya, dipadamkan, yang mengokohkan kekuasaan negara kolonial Hindia Belanda. Namun, seraya itu pula, sebagai akibat introduksi pendidikan, benih-benih kesadaran modern muncul dan mencari bentuk dalam tatanan kolonial yang tidak seimbang dan eksploitatif. Proses itu tidak terlepas dari dan berkembang dalam penancangan dan pelaksanaan politik kolonial modern, yang diperkenalkan sebagai Politik Etis (*Etische Politiek*), berdasarkan pidato Ratu Belanda yang menyerukan pembaharuan kebijakan penjajahan sebagai bentuk ungkapan membalas suatu hutang budi atau *eereschuld*.<sup>1</sup>

Kesadaran modern berkembang dalam nuansa emansipatoris, mulai dari ranah sosial, ekonomi, hingga politik. Proses itu berkembang pada lapisan sosial menengah masyarakat jajahan Hindia Belanda, yaitu di kalangan *priyayi* dan *santri* (Fakih, 2012; dan Hernawan, Lubis & Zakaria, 2014). Pada awal abad ke-20, mereka merintis dan merebak pentas politik negeri jajahan, yang memperjuangkan tidak lagi sebatas persamaan hak dan kewajiban, melainkan meningkat menjadi memperjuangkan kebebasan (*freedom*) dalam seruan kemerdekaan (*independence*) sebagai sebuah bangsa.

Cita-cita, gagasan, dan konsepsi mengenai bangsa yang merdeka berkembang dalam konteks dialogis, baik di lingkungan anak jajahan maupun dengan penguasa kolonial. Masa itu, dalam penulisan sejarah Indonesia, dikenal sebagai masa Pergerakan Kebangsaan atau Pergerakan Nasional (*National Movement*). Awal masa yang penuh dengan semangat, gejolak, dan dinamika itu dirintis oleh pembentukan suatu organisasi sukarela modern atau *modern voluntary organization*, menurut

<sup>1</sup>Namun jelas, tujuan kolonialisme yang sebenarnya di balik politik itu, sebagaimana ditegaskan oleh Daya Negri Wijaya (2013:79), adalah: "Kaum penjajah Belanda justru berusaha dengan sekuat tenaga agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang cerdas dan maju serta sadar akan harga dirinya sebagai bangsa. Hal ini pasti akan menjadi bumerang yang justru mengancam kelangsungan hidup dan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan sebaliknya, kaum penjajah Belanda berusaha sedapat mungkin agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang bodoh dan terbelakang, sehingga mudah dijajah dan diperintah serta dikendalikan".

istilah Taufik Abdullah (2009:9), yaitu Boedi Oetomo (Budi Utomo). “*Organisasi ini bertujuan membebaskan masyarakat Jawa dari cengkraman kemiskinan dan keterbelakangan,*” demikian penegasan Taufik Abdullah (2012:68).

Gagasan pendirian itu berasal seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran, STOVIA (*School tot Opleiding voor Indische Artsen*), yaitu Soetomo, yang tergolong usia pemuda dan memiliki keprihatinan terhadap keadaan yang dihadapi oleh banyak pemuda Jawa, dalam hal untuk memenuhi pembiayaan pendidikan atau sekolah. Gagasannya bersambut dengan pemikiran seorang dokter senior lulusan lembaga pendidikan yang sama, yaitu dr. Wahidin Sudirohusodo. Bersama-sama beberapa rekan se-kampus, dia mendirikan perkumpulan tersebut. Setelah lulus, Soetomo merintis karier di bidang pengabdian sebagai dokter, sambil mengembangkan gagasan politiknya, yang merupakan mimpi dan visi masa mudanya (Wijaya, 2013). Budi Utomo, kemudian, juga berkembang menjadi organisasi politik, yang memainkan peranan tidak kecil dalam pentas pergerakan nasional, termasuk di lingkungan politik kolonial.

Dalam kiprah politiknya, yang tidak terhenti setelah menyelesaikan pendidikan medis, Soetomo memperoleh berbagai pengalaman di berbagai bidang. Setelah keluar dari BU (Budi Utomo) dan menyelesaikan kesempatan pendidikan lanjutan di negeri Belanda, yang dikenyam sambil bergiat dalam organisasi mahasiswa asal Indonesia (Hindia Belanda), yaitu Perhimpunan Hindia (*Indische Vereeniging*), Soetomo meneruskan cita-cita dan perjuangan dalam jalur organisasi. Dia membentuk Studi Klub Indonesia di Surabaya, yang berkembang dan berubah menjadi PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), yang ketika menyatu dengan Budi Utomo, kemudian menjelma menjadi PARINDRA (Partai Indonesia Raya).

Dalam proses itu, Soetomo menghasilkan berbagai gagasan, pemikiran, karya, dan karsa. Sebagian dari hal-hal itu terekam dalam berbagai tulisan yang dibuatnya, dan

terbit serta tersebar di sejumlah media, mulai dari surat kabar, majalah, buku, dan artikel (van der Veur ed., 1984). Malahan, dia ikut menyemarakkan cakrawala pers pergerakan nasional, dengan mendirikan surat kabar dan majalah. Peranan dan sumbangsuhnya dalam dunia pers pergerakan nasional belum banyak diteliti dan diungkapkan secara akademik dan populer.

Gagasan dan kiprah perjuangan dokter Soetomo telah banyak dibahas oleh berbagai kalangan di sejumlah kesempatan, seperti seminar, diskusi, penerbitan, dan lainnya. Sosok tokoh ini mulai memperoleh perhatian dalam karya Akira Nagazumi (1989) tentang kebangkitan nasionalisme Indonesia, yang berkaitan dengan pendirian dan perkembangan awal Budi Utomo. Kemudian, sosoknya muncul dalam gambaran dan tinjauan dari Paul W. van der Veur (1984), yang menyelipkan beberapa karya tulisnya. Dalam perbandingan dengan dua tokoh pergerakan nasional lainnya, Savitri Prastiti Scherer (1985) membahas tokoh ini dalam pengaruh lingkungan budaya yang bergerak dalam harmonisasi yang dinamis. Penulisan ilmiah mutakhir adalah suatu terbitan dari Museum Kebangkitan Nasional tahun 2013 (Kasenda, Tangkilisan & Marihandono eds., 2013).

Tampak dari berbagai karya tersebut, gagasan, pemikiran, kiprah, dan perjuangan dokter Soetomo merambah ke berbagai bidang kehidupan, tidak hanya politik dan sosial, tetapi memperlihatkan pula perhatian dan keprihatinan besar terhadap masalah perekonomian. Malahan, gagasan kemerdekaannya, di samping terarah pada kebebasan politik dari belenggu penjajahan, juga memasukkan masalah kesejahteraan sebagai tujuan yang tidak kalah pentingnya. Indonesia Raya merupakan gagasan, cita-cita, dan tujuan perjuangan politiknya. Indonesia Mulia adalah pemikirannya tentang kesejahteraan rakyat dalam derap perjuangan kemerdekaan, dalam suatu gerakan perubahan.

R.Z. Leirissa (1985) mengungkapkan bagaimana gerakan itu menjangkau hingga ke daerah-daerah di luar pulau Jawa, dengan menyatakan sebagai berikut:

PBI [Persatuan Bangsa Indonesia] berusaha meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dengan mendirikan pelbagai lembaga ekonomi di kota maupun di desa. PBI yang berlandaskan persatuan nasional itulah yang didekati oleh Boedi Oetomo. Pada tahun 1934, keduanya membentuk suatu panitia untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan fusi. Usaha ini berhasil pada Konferensi di Yogyakarta pada bulan Oktober 1935. Nama baru yang dipakai adalah Partai Indonesia Raya (Parindra). Kegiatan-kegiatan PBI tetap diteruskan, namun dasar-dasar kebudayaan dari Boedi Oetomo memberi arti yang khusus pada kegiatan-kegiatan ekonomik itu. Kemudian pelbagai organisasi etnis bergabung pula dalam Parindra.

Parindra merupakan suatu wadah dari golongan yang ingin mengubah struktur masyarakat dengan cara-cara pembangunan ekonomi. Usaha ini sangat banyak berhasil, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Juga cabang-cabang Parindra di Ujung Pandang dan Ambon sangat banyak membantu menanamkan kesadaran akan perubahan masyarakat dan peningkatan kemakmuran (Leirissa, 1985:70-71).

Pemikiran ekonomi Soetomo, seperti yang terkandung dalam Indonesia Mulia, menyiratkan visi untuk sebuah bangsa yang sedang berjuang untuk meningkatkan harkat menjadi merdeka dan sejahtera. Visi Indonesia sejahtera terasa sangat relevan dan signifikan, tidak hanya untuk sezamannya melainkan juga untuk Indonesia saat ini. Bahkan Presiden Soeharto, pada 30 Mei 1969, menyatakan sebagai berikut:

Tiga puluh satu tahun yang lalu, dr. Soetomo telah wafat [...]. Akan tetapi satu hal yang masih hidup dan terus akan hidup ialah semangat dan cita-cita dr. Soetomo. Kita dapat jelas melihat, bahwa cita-cita dr. Soetomo telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (dalam van der Veur ed., 1984).

Menyibak visi Soetomo tentang Indonesia Mulia membawa perhatian pada masalah moral ekonomi Indonesia. Soetomo mengemukakan, dalam beberapa kesempatan, mengenai tugas dan kewajiban moral elite masyarakat Indonesia. Seruan itu tidak hanya terbatas pada seruan, melainkan dilaksanakan dan diterapkannya dengan bekerja langsung di tengah-tengah rakyat, terutama ketika sedang menghadapi kesulitan sebagaimana terjadi pada masa

Depresi Ekonomi yang melanda Hindia Belanda (Indonesia masa kolonial Belanda) pada tahun 1930-an. Visi Indonesia Mulia bertumpu pada moral ekonomi Indonesia, yang bemuara pada kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang menjadi tujuan dan moral perjuangan sebagai wujud pengabdian kepada Tanah-Air.

## **INDONESIA MULIA**

Walau telah mencapai tataran kesepahaman dan kesamaan tujuan berdasarkan cita-cita untuk masa mendatang, yaitu kebangsaan dan kemerdekaan, pergerakan nasional memperlihatkan juga spektrum perbedaan ideologi dan gagasan tentang bagaimana memaknai dan mewujudkannya di tengah-tengah dinamika zaman. Soetomo adalah salah seorang tokoh yang memikirkan dan membayangkan persoalan tersebut sebagai suatu proses yang tidak berhenti dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Juga Soetomo tidak memandang bahwa kemerdekaan sebagai sarana atau sekedar jembatan untuk memasuki suatu zaman yang berbeda.

Terlebih daripada itu, Soetomo memaknai kemerdekaan sebagai suatu gagasan yang mencakup kemajuan atau perbaikan kesejahteraan rakyat. Ia kemudian mengatakan sebagai berikut:

[...] kami harus menghargai kemerdekaan sebelum kami menginginkannya; sebab, bahkan apabila besok kami menjadi merdeka, maka apa gunanya kemerdekaan tersebut apabila kami tidak berada dalam posisi mampu memanfaatkan kemerdekaan tersebut bagi kesejahteraan rakyat kami. Banyak orang di negeri saya tidak berpikir seperti saya (dalam van der Veur ed., 1984:34-35).

Selanjutnya, Paul W. van der Veur [ed] menjelaskan bahwa Soetomo menandakan akan adanya “pembangunan bangsa” (*moreele herbewapening*), “kebangkitan moral”, “kegiatan diri sendiri” (*otoaktivitas*), dan sebuah konsep “Indonesia Mulia” (van der Veur ed., 1984:33).

Selain membayangkan Indonesia Merdeka, Soetomo mengajukan pemikiran tentang Indonesia Mulia. Merujuk ke karya

Soetomo, *Puspa Rinontje*, Paul W. van der Veur [ed] kembali mengemukakan pandangan Soetomo, sebagai berikut:

[...] cita-cita Indonesia Mulia tidak akan terhalang, tidak akan berhenti walaupun negara kita sudah merdeka. Tujuan memuliakan bangsa tidak berhenti walaupun seandainya bangsa kita sudah merdeka. Masih harus abadi, masih harus terus berbakti kepada Ibu Pertiwi, dengan bekerja keras tanpa mengharap jasa (dalam van der Veur ed., 1984:34).

Sementara itu, Susan Abeyasekere, seorang peneliti tentang sejarah Indonesia modern, juga mengungkapkan tentang kehidupan dan pemikiran Soetomo, sebagai berikut:

Soetomo's life and thought blended foreign and Javanese aspects. He himself was far from provincial, having worked in Sumatra as well as Java, studied medicine at Amsterdam and married a Dutch-woman. His aim was a united, glorious Indonesia, "Indonesia Moelia" (which in his view subsumed independence), and to this end, he drew inspiration from the Japanese "samurai", from Gandhi, and in fact from all strong nationalist leaders from Kemal Attaturk to Hitler (Abeyasekere, 1972:263).

Visi Indonesia Mulia, yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, menyiratkan berbakti kepada Ibu Pertiwi dan bekerja keras tanpa pamrih atau mengharap jasa. Soetomo memikirkan dan memperjuangkan cita-citanya untuk memajukan Indonesia dan rakyat Indonesia dalam kerangka gerakan politik, ketika membentuk PARINDRA (Partai Indonesia Raya). Kesungguhan itu tampak pada pandangan Susan Abeyasekere tentang Soetomo, sebagai berikut:

In 1937, the party's principles were officially clarified, the final goal being Indonesian "Moelia", and the means being the education of the people socially, economically, and politically, so that they could carry on the government of the country. More immediate, concrete goals were drawn up, including a central representative body commanding political power, a native militia, and tenure of all civil and military positions by Indonesians. Officially, the issue of independence or "kemerdekaan", known to be a word that repelled the Dutch, was dodged, although

several leaders openly announced that it was a necessary ingredient of "Indonesia Moelia" (Abeyasekere, 1972:266).

Bagaimana hendak mencapai tujuan itu, yakni Indonesia Mulia, dalam perjuangan Soetomo setidaknya tampak pada kutipan di bawah ini:

Soetomo's fundamental aim, therefore, was not so much the encouragement of an anti-colonial confrontation with the Dutch colonial power, but the development within Indonesian society of what the Indians called "satyagraha", and the Indonesia's "daya kebatinan", namely "inner spiritual power". Of course, this almost exclusive concern with the nature of Indonesian society, rather than with the colonial relationship, meant that Soetomo's vision tended to ignore the reality of Dutch power. But, if Dutch power was ultimately based on White racial "prestige", and if such prestige depended on a notion of moral superiority, then, clearly the development of what might be called "moral self-confidence" among Indonesians would alter the colonial relationship. Colonial self-confidence in the right to rule would evaporate, and the way would be paved for "merdeka" (national freedom) in the fullest sense: a freedom that would be spiritual as well as political. For Soetomo, the achievement of Indonesia "Merdeka" or Free Indonesia was dependent on a much broader goal – the creation of "Indonesia Mulia" or a Noble Indonesia (dalam Christie, 2001:50).

Jelas, ketimbang menghabiskan energi untuk melawan kekuasaan dan kekuatan kolonial Belanda, suatu masalah yang lebih penting untuk mengarah ke emansipasi adalah meningkatkan moral dan semangat rakyat agar percaya diri, yang digali dari budaya sendiri, tidak mengadopsi dari luar, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dalam perjuangan melawan kolonialisme Inggris di India.

Selanjutnya, dalam ulasan Savitri Prastiti Scherer, tentang pemikiran dan cita-cita Soetomo, dinyatakan sebagai berikut:

Dengan demikian, rakyat perlu dituntun supaya mereka dapat hidup dalam kemakmuran, dan kemakmuran mereka sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Mulia. Apa yang menarik dalam anjuran Soetomo mengenai rakyat bukanlah semata-mata bahwa rakyat mesti dituntun, melainkan bahwa hanya rakyat

jelata, kaum murba, kaum karma, kaum buruh, kaum tani, itulah yang terpikir oleh Soetomo, yang harus dipimpin Parindra. Mengenai golongan menengah, Soetomo berkata dalam artikelnya, Parindra mesti memberikan contoh dan kegiatan supaya barisan nasional yang kuat dapat dibangun dengan teguh. Kepada golongan berpendidikan, Parindra akan membuat suatu upaya untuk menambah dan meningkatkan darma bakti mereka kepada rakyat dan bangsa, sebagai penuntun bagi masyarakat selebihnya. Soetomo menganggap golongan berpendidikan itu sebagai golongan yang paling pantas menuntun masyarakat selebihnya, karena mereka dipersenjatai lebih (Scherer, 1985:244).

Gagasan kesejahteraan itu menjadi tujuan perjuangan politiknya dalam PARINDRA (Partai Indonesia Raya). Kenichi Goto, seorang peneliti Jepang tentang sejarah Indonesia modern, menyatakan sebagai berikut:

Dalam anggaran dasar Parindra disebutkan bahwa tujuan dan gagasan ideologi partai yang paling mendasar adalah mewujudkan Indonesia Mulia, dengan pengertian Indonesia yang makmur. Meskipun saat itu kata-kata ideologis “merdeka”-lah yang paling digandrungi dalam gerakan kebangsaan, Soetomo sebagai ketua partai dalam aktivitas politiknya tetap mengutamakan misi partai untuk mewujudkan Indonesia Mulia tersebut. Menurutnya, mewujudkan “merdeka” tidak otomatis membawa kemakmuran bagi suatu bangsa, tetapi mewujudkan “masyarakat yang makmur” pasti dilandasi kemerdekaan terlebih dahulu (Goto, 1998:366-367).

Ulasan berikutnya dari Kenichi Goto mengungkapkan bahwa:

Partai yang dipimpin oleh kaum intelektual Jawa, yang tergolong lapisan kaya dan menitikberatkan aktivitas yang mengacu pada reformasi ini, mencoba mencari model modernisasi Indonesia, bukan dari negara-negara Barat melainkan dari negara maju di kawasan Asia. Di mata dr. Soetomo, penganut reformasi sosial yang tulus, sejarah modernisasi Jepang, yang hanya dalam jangka waktu 70 tahun telah berhasil mengubah dirinya dari negara agraris yang semi feodal menjadi negara industri yang modern, tampak merupakan suatu contoh keberhasilan nyata yang berharga, sehingga ia sering berbicara sambil mencontohkan Jepang. Hal itu terutama berdasarkan keyakinan bahwa Jepang merupakan contoh terbaik untuk membuktikan

kebenaran gagasan partai yang mementingkan segi pendidikan serta reformasi sosial-ekonomi secara bertahap hingga dapat mewujudkan kondisi “mulia” tersebut di atas (Goto, 1998:367).

Sementara itu, Slamet Mulyana, dalam kajiannya tentang zaman pergerakan nasional di Indonesia, mengungkapkan sebagai berikut:

Dalam pidatonya pada pembukaan Kongres Indonesia Raya I tahun 1932, untuk menyongsong keluarnya Soekarno dari penjara Sukamiskin [Bandung], Sutomo tidak menggunakan kata-kata “Indonesia merdeka”, tetapi “Indonesia mulia”, sedangkan pada waktu itu sudah menjadi kebiasaan gerakan nasional untuk menggunakan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan kepartaian. Sutomo tetap menggunakan *Indonesia mulia*; katanya: “Lebih baik ke neraka bersama-sama dengan rakyat daripada hidup badan sendiri di surga. Menghamba pada keadilan dan kebenaran itu bermaksud bekerja dan berusaha seterusnya dengan ketetapan hati dan melintasi jalan yang membawa kita ke Indonesia mulia” (Mulyana, 2008:235-236).

Sebagai catatan tambahan, ungkapan atau kata-kata “Indonesia mulia (mulya)” merupakan bagian dari syair lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman, yang pertama kali dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, berjudul “Indonesia Raya” (Banoe, 2003:194-195). Pada masa pendudukan Jepang, lagu hymne yang kemudian menjadi lagu kebangsaan (*national anthem*) ini tidak dinyanyikan sebagai “Indonesia Raya”, melainkan “Indonesia Mulia” (Anwar, 2009:277).

## MORAL EKONOMI INDONESIA

Soetomo memiliki intuisi dan kepekaan terhadap keadaan dan perkembangan rakyat dan bangsanya. Dia yang terlahir dan bertumbuh di daerah pedesaan sangat memahami keadaan dan permasalahan rakyatnya, yang sebagian besar adalah kaum tani; walau keluarganya memiliki latar belakang *priyayi*. Sebagaimana yang digambarkan oleh berbagai studi tentang masyarakat Indonesia, dan Asia Tenggara pada umumnya, seperti Clifford Geertz (1983); James Scott (1983); dan J.H.

Boeke (1983), petani tergolong lapisan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki ruang untuk berkembang, sehingga mempengaruhi inisiatif dalam upaya memperbaiki keadaan kehidupan.

James Scott, misalnya, mengemukakan teori subsistensi yang menggambarkan bagaimana kehidupan petani (penduduk pedesaan) seperti berada di kedalaman air yang menggenang mendekati hidung, sehingga gelombang kecil pun sudah dapat menenggelamkan mereka (Scott, 1983). Clifford Geertz juga menyatakan bahwa selama penerapan kebijakan agraria Hindia Belanda, penduduk pedesaan di pulau Jawa justru mengalami involusi, atau pertumbuhan ke dalam, yang memperlihatkan belitan dan kesulitan hidup semakin rumit, sehingga menimbulkan pembagian kemiskinan atau *shared poverty* (Geertz, 1983). Sedangkan J.H. Boeke terkenal dengan teori ekonomi dualisme, yang menjelaskan keterbelakangan atau *backwardness* dan kemiskinan atau *poverty* di sektor perekonomian non-Barat, sebagai faktor budaya yang mencakup ketiadaan inisiatif dan kemampuan teknologi atau *cultural restraints* (Boeke, 1983).

Teori struktural menjelaskan keterbelakangan itu sebagai akibat pengekanan kolonialisme (Roxborough, 1990). Beberapa kajian sejarah mutakhir mengkaitkan keadaan Indonesia yang tertinggal sebagai akibat perubahan orientasi dari kemaritiman menjadi terbatas pada agraria, sejalan dengan kekuasaan dan kebijakan kolonialisme di Hindia Belanda. Pandangan ini berlandaskan pada adanya kejayaan Nusantara pada masa pelayaran dan perdagangan laut dalam Sejarah Indonesia.<sup>2</sup>

Pada struktur agraria kolonialistik itu berlangsung pola hubungan yang tidak

<sup>2</sup>Pada pidato meresmikan Institut Angkatan Laut tahun 1953, Presiden RI (Republik Indonesia) pertama, Ir. Soekarno, menyatakan: "Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut **kembali**. Bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi *jongos-jongos* kapal, tetapi bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri". Pada pidato ini tampak kesadaran kejayaan maritim masa lampau. Pencetak tebal kata "kembali" berasal dari penulis.

seimbang dan eksploitatif menyangkut kepentingan kepemilikan lahan (*land holding*) dan pengerahan tenaga kerja (*labor mobilization*). Penerapan pola kapitalisme dalam usaha pertanian dan perkebunan menyebabkan keterbelakangan pedesaan (*peasantry backwardness*). Apalagi dalam proses introduksi modernisasi (*modernization*) itu, masyarakat pedesaan dibebani dengan pungutan berupa pajak (*taxation*) oleh pemerintah kolonial, yang menambah kewajiban mereka yang tetap harus diberikan kepada penguasa tradisional (*traditional obligations*). Kebijakan-kebijakan itu mengekang perkembangan masyarakat pedesaan untuk menjadi bagian mekanisme perekonomian modern.<sup>3</sup>

Perhatian Soetomo selalu ditujukan kepada semua rakyat jelata dari segala macam lapisan. Sementara ia bekerja bersama teman-teman kelompok cendekiawan lainnya, ia mencoba meletakkan dasar bagi sebuah negara modern dengan menjadikan suatu kerangka kerja yang sesuai, baik bagi para tani maupun buruh. Sampai dengan akhir 1937, Soetomo belum juga putus asa mengajak kaum *ningrat* agar mereka berjuang sesuai dengan martabatnya. Seraya itu, tanpa lelah ia tetap bekerja bagi rakyat jelata di rumahnya di Surabaya (van der Veur ed., 1984).

Gambaran Soetomo mengenai keadaan masyarakat Indonesia antara lain adalah: (1) Jeratan dan tirani kemiskinan atau *poverty* dan keterbelakangan atau *backwardness*, yang telah tampak ketika mendirikan Budi Utomo; (2) Tingkat pendidikan yang rendah dan kesenjangan yang lebar; (3) Ketiadaan prakarsa atau inisiatif rakyat untuk memperbaiki tingkat kehidupan sendiri; (4) Ketidakpedulian *priyayi*; dan (5) *Priyayi* sebagai potensi penggerak kemajuan (*cf* van der Veur ed., 1984; Scherer, 1985; Dhont, 2005; dan Abdullah, 2009 dan 2012).

Dari gambaran yang diberikan oleh John Ingelso, seorang sejarawan Australia yang

<sup>3</sup>Walau demikian, kehidupan ekonomi pedesaan sempat menjadi katup penyelamat ketika krisis ekonomi global melanda. Pada saat terjadi banyak pemecatan dan pengangguran sebagai akibat Depresi Ekonomi yang berawal tahun 1929 di pasar bursa Wall Street, New York, Amerika Serikat, banyak penduduk perkotaan yang kembali ke desa asal mereka untuk menyambung hidup.

pakar tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia, mengenai PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) tersirat keyakinan Soetomo tentang kewajiban moral elite Indonesia, yang memiliki latar belakang pendidikan Barat, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, yang tidak hanya mencakup politik melainkan meliputi ekonomi dan sosial (Ingelson, 1983:140). Soetomo memahaminya sebagai suatu keseluruhan, tidak secara terpisah, dalam upaya menggapai kemajuan.

Menggali pemikiran tentang moral ekonomi tidaklah mudah. Moral ekonomi awalnya diperkenalkan oleh Adam Smith, yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat dalam suatu negara atau *the wealth of nation*.<sup>4</sup> Kemudian, seorang sejarawan Inggris, E.P. Thompson, memakai konsep moral ekonomi secara lebih eksplisit dalam karyanya, *The Moral Economy of the Factory System* (1835), yang mengupas keyakinan agama dalam konteks ekonomi, sehingga menempatkan ekonomi pada landasan moral berkaitan dengan keadilan dan kemiskinan (dalam Burke, 2003:105-106).

Berkaitan dengan keadilan, kutipan berikut berasal dari sudut pandang filsafat, yaitu:

Selain berkonsentrasi pada persoalan dinamika logika pemikiran ekonomi, kita akan memberi perhatian pada masalah moral ekonomi; argumen di balik pemikiran ini adalah bahwa masalah ekonomi pada akhirnya bersentuhan dengan masalah fundamental, seperti kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama dan keadilan (Dua, 2008:13).

<sup>4</sup>Pemikiran ekonomi Adam Smith yang menyangkut masalah etika dan moral ditegaskan oleh A. Sonny Keraf (1996:17), yaitu: "Adam Smith lebih dikenal sebagai ekonom daripada sebagai seorang filsuf, apalagi seorang filsuf moral. Ketenarannya sebagai ekonom, khususnya sebagai pencetus sistem ekonomi pasar bebas, sedemikian besar sehingga orang lupa bahwa sesungguhnya dia adalah seorang filsuf moral; dan sistem ekonomi pasar bebasnya dicetuskan dalam kerangka kuliahnya mengenai moralitas. Sebelum terbit bukunya, *The Wealth of Nations (WN)*, pada tahun 1776, Adam Smith memang populer sebagai seorang filsuf moral lewat bukunya, *The Theory of Moral Sentiments (TMS)*, yang diterbitkan pada tahun 1759. Namun setelah muncul bukunya, *WN*, para etikus cenderung melupakan etikanya, dan para ekonom malah mengabaikannya. Baru pada dua dasawarsa terakhir, etika Adam Smith mulai dikaji kembali dan kini mendapat perhatian serta publikasi yang semakin luas".

Definisi lainnya, moral ekonomi adalah tindak-tanduk ekonomi (*economic behavior*) sebagai kelakuan yang dikendalikan oleh nilai-nilai budaya; dan karena itu, perlu dilihat sebagai suatu jenis tindakan sosial (*social action*) dalam menghadapi sumber daya (Kleden, 2004:180).

Pemikiran Soetomo tentang moral ekonomi tidak secara eksplisit muncul dari karya-karyanya. Namun, dari kiprah dan kinerja sebagai seorang tokoh pergerakan nasional yang prihatin terhadap nasib rakyat, yang menjadi tujuan perjuangannya, telah mencerminkan suatu moral ekonomi yang berlandaskan pada kemajuan (*progress*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Oleh karena itu, pengungkapan pemikirannya dilakukan secara implisit dari analisis tentang kewajiban moral perjuangan yang menuju pada Indonesia merdeka (*independent Indonesia*), Indonesia raya (*greater Indonesia*), dan Indonesia mulia (*noble Indonesia*).

Salah satu sumber analisis itu berasal dari telaah Savitri Prastiti Scherer, yang pada saat mengadaptasi tentang butir-butir moral ekonomi, menjadi sebagai berikut: (1) Pengabdian, yang merupakan kewajiban moral dan wujud cinta terhadap negeri dan Tanah-Air, yang tentunya tanpa pamrih dan mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki; (2) Profesionalitas, yaitu sikap memilih bentuk pengabdian sesuai keahlian dan sebagai pelaksanaan *pegaweyan* yang dipunyai; dan (3) Pelaksanaan *pegaweyan* dalam harmonisasi sosial (Scherer, 1985: 230),

Sementara itu, dalam ulasan lainnya tentang pemikiran dan tindakan Soetomo, Susan Abeyasekere memunculkan konsep "dharma", yakni:

[...] a strong humanitarian streak in him coincided with a Javanese sense of "dharma ksatria". Although he objected to Western class divisions, he saw Indonesian society as consisting of groups which had distinct duties. If each group obeyed its "dharma", society would prosper and function harmoniously (Abeyasekere, 1972:263).

## MODAL SOSIAL

Peningkatan kehidupan perekonomian telah menjadi tujuan dalam sejarah

di berbagai tempat, walau persoalan pemerataan kesejahteraan merupakan pemikiran dan perkembangan pada masa modern. Peranan modal (modal) dalam peningkatan perekonomian jelas sangat penting, bersama-sama faktor ekonomi lainnya. Akumulasi modal, yang berasal dari keuntungan (*profit*) yang diperoleh, dalam bentuk penanaman modal kembali mendorong perputaran usaha untuk berkembang lebih besar (*big business*), hingga menjadi konglomerasi (*conglomeration*).

Perkembangan teori ekonomi dan bisnis memperlihatkan bahwa tidak hanya faktor-faktor ekonomi yang menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan, terutama dalam pembangunan ekonomi. Selaras dengan perkembangan perhatian dan orientasi pada keadilan (*justice*) dan pemerataan kesejahteraan (*welfare*), masalah nilai-nilai budaya (*cultural values*) juga memperlihatkan peranan yang tidak kalah pentingnya. Kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan orientasi dan nilai-nilai budaya yang kerap dikatakan tidak sesuai dengan semangat kapitalisme (*spirit of capitalism*), seperti yang pernah diungkapkan oleh seorang sosiolog, Max Weber (2007).

Nilai-nilai budaya itu dikaitkan dengan ajaran keyakinan atau agama. Gejala yang mirip tampak pada pandangan Etos Kerja (*Business Ethics*), Budaya Kerja (*Corporate Culture*), Modernisasi (*Modernization*), Kemiskinan Struktural (*Structural Poverty*) dan Cara Produksi Asia (*Asian Mode of Production*). Robert N. Bellah meneliti budaya dan masyarakat Jepang dalam perkembangan ekonomi, dengan menelaah agama Tokugawa. Semangat kapitalisme pun tampak pada ajaran dan norma-norma agama tersebut (Bellah, 1992).

Perdebatan mengenai emansipasi kemampuan dan kekuatan ekonomi masyarakat, terutama kalangan pengusaha dan wiraswasta, dalam kebijakan pembangunan ekonomi (*economic development*) bermula pada faktor penyebab latar belakang pendidikan dan ketiadaan modal. Pendekatan terhadap permasalahan ini tidak harus secara

dikotomi, melainkan dapat menjadi suatu komplementasi, untuk memunculkan dan memperkuat kemampuan wirausaha (*entrepreneurship*). Dalam kaitan teori modernisasi, faktor pendidikan memainkan peranan penting dalam menciptakan perubahan sosial untuk menghasilkan pembaharuan. Faktor ekonomi (modal) menjadi bagian dalam perbincangan khazanah ekonomi-politik.

Perkembangan peranan faktor non-ekonomi tampak pada pemikiran Francis Fukuyama (1996), yang menyoroti persoalan kepercayaan (*trust*) dalam perekonomian suatu negara. Pengalaman beberapa negara dalam persaingan ekonomi dengan negara lainnya memperlihatkan betapa kepercayaan masyarakat terhadap produksi nasionalnya (nasionalisme ekonomi) mampu mengatasi serbuan perdagangan asing. Perkembangan berikutnya menyangkut pengembangan modal sosial (*social capital*), yang mengeksplorasi keunggulan (*advantages*) yang ada dalam masyarakat sebagai suatu jaringan yang hidup bersama menyangkut norma-norma sosial (*social norms*). Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa langkah pertama untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tertinggal adalah melalui perbaikan pendidikan.

Menurut Hetifah Sj. Sumarto, modal sosial adalah proses antar-manusia yang membentuk jaringan, norma-norma, kepercayaan sosial, serta memfasilitasi koordinasi dan kerja sama bagi keuntungan bersama. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam prakteknya, memperkuat modal sosial kelompok miskin berarti meningkatkan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam *governance*. Modal sosial dan masyarakat yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi yang otentik dari kelompok miskin (Sumarto, 2009:6).<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Batasan lainnya tentang "modal sosial", yang kadang disebut "infrastruktur", adalah modal yang memberikan jasa bagi masyarakat; sebagian besar modal sosial berbentuk sarana publik seperti jalan raya, jembatan, sistem angkutan massal, serta sistem pengolahan air dan limbah; pos polisi, pos pemadam kebakaran, balai kota, pengadilan, dan mobil polisi, semua adalah bentuk "modal sosial" yang digunakan

Dalam karya Umar Hasan, Dedy Irawan & Heru Kamarudin tercantum 3 definisi mengenai modal sosial. Definisi pertama merujuk pada pandangan Robert Putnam, yang menyatakan sebagai ciri-ciri kehidupan sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan, yang mendorong orang untuk bertindak bersama secara lebih efektif guna mencapai tujuan bersama. Batasan kedua mengacu pada pandangan Bank Dunia atau *World Bank* tahun 2000, yaitu institusi, hubungan, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas sebuah interaksi sosial. Definisi ketiga mengarah pada pendapat Narayan sebagai aturan dan norma, kewajiban, saling menghormati dan berbagi, serta kepercayaan yang melekat pada hubungan sosial, struktur sosial, dan tatanan kelembagaan sosial yang membantu anggota masyarakat mencapai tujuan individu dan kelompoknya (Hasan, Irawan & Kamarudin, 2008:137).

Sekaitan dengan “modal sosial” ini, Soetomo pada tahun 1930-an pernah menyatakan sebagai berikut:

Mengingat kemelaratan oemoem dan kekoerangan modal, atau tidak adanya modal dalam masyarakat Indonesia, mengingat poela oentoek dan sifat jang *specipiek* dari masyarakat Indonesia, jalah jang masih berdasar atas adat dan kemaean tolong-menolong dari orang-orang poeteranja, maka oesaha jang paling gampang dan baik oentoek mengganti dan memperbaiki masyarakat itoe kira-kira ialah jang didasarkan atas adat dan kebiasaan jang soedah ada itoe, hanja sadja dibaharoeakan, dibikin modern, dan diatoer dengan pengetahoean, artinja membangoenkan masyarakat atas dasar dan perasaan *cooperatief*, tolong-menolong, tetapi dalam mana tentoenja masih ada tempat djoega boeat oesaha-oesaha seseorang sendiri atau *individueel initiatief* dan oentoek mengakoei hak satoe-satoenja orang oentoek mempoenjai milik atau *privaat bezit* (Soetomo, 1982:320-321).

Soetomo telah menyadari bahwa perasaan gotong-royong atau tolong-menolong yang sudah berakar dalam kehidupan dan adat-istiadat masyarakat Indonesia menjadi modal penting untuk pembangunan dan

---

sebagai barang *input* untuk memproduksi jasa yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, lihat Karl E. Case & Ray C. Fair (2007:268).

peningkatan kesejahteraan.<sup>6</sup> Namun, gagasan ini tidak digali dan dikembangkan lebih lanjut. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, gagasan itu telah tampak pada perjuangan Soetomo, yang tidak hanya pada tataran kata-kata, atau untaian pidato, melainkan juga pada tindakan nyata dengan memperbaiki taraf kehidupan rakyat, seperti pendirian lembaga koperasi dan perbankan.

Oleh karena itu, banyak kalangan yang merasa kehilangan ketika Soetomo meninggal dunia pada tahun 1938, dan banyak yang hadir (sekitar 50,000 orang) untuk memberikan penghormatan terakhir. Kutipan di bawah ini menggambarkan kebesaran jasa, pemikiran, dan tindakan Soetomo, yaitu:

After Soekarno's internment, Soetomo was probably the most famous of the active nationalist leaders. He commanded the love and respect of people in and beyond the confines of his party, as was shown most strikingly when 50,000 attended his funeral. Through his energy and self-sacrifice, he fully lived up to the example of Krishna, which he so often held up to others to encourage them to work without regard to the reward. His motto was self-help. Parindra, like the PBI before it, emphasised the character-building and education of the spirit, which came through selflessly helping to build up the nation (Abeyasekere, 1972:263).

Juga semboyan perjuangan Soetomo, yang senantiasa dikenang adalah mandiri (*self-help*). Susan Abeyasekere (1972) mengibaratkan Soetomo sebagai seorang Prabu Kresna, tokoh pewayangan yang terkenal dengan pengorbanan tanpa pamrih dan arif, yang berpihak pada kaum Pandawa (lambang kebaikan) dalam pertempuran akhir di Kurusetra melawan kaum Kurawa (lambang keburukan).

---

<sup>6</sup>Gotong-royong dan koperasi tampaknya sudah menjadi tema sentral dalam pemikiran para tokoh pergerakan nasional, yang mencerminkan kesadaran persatuan dan kesatuan dalam meraih dan menggapai cita-cita, berupa melepaskan diri dari belenggu penjajahan untuk memperoleh kemerdekaan atau kebebasan. Kesadaran itu mencuat dalam rasa kebangsaan dan semangat nasionalisme, yang telah dikumandangkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Dewasa ini, sebagai catatan, dikotomi nilai-nilai sosial dalam ungkapan Soetomo mengingatkan pada Polemik Kebudayaan tahun 1930-an, yang melibatkan dirinya juga. Nilai gotong-royong dan koperasi tampaknya telah terlupakan, atau terkikis, oleh terpaan perubahan zaman.



**Dokter Soetomo**

(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com), 2/3/2015)

### **PEMAHAMAN DAN PEMAKNAAN**

Soetomo adalah salah seorang pemuda yang memiliki visi dan cita-cita yang jauh melangkahi zamannya. Dalam perjalanan hidup dan perjuangannya, pengalaman dan gembengan masa muda telah membentuk gerak dan kiprah pergerakan Soetomo di bawah cakrawala pengabdian, kebebasan, dan melawan belenggu keterbelakangan. Tentunya, sosok pemuda seperti itu menjadi harapan bangsa saat ini, di tengah-tengah perjuangan untuk menggeliat bangkit meraih Indonesia yang maju dan mulia. Savitri Prastiti Scherer, lebih lanjut, menyatakan tentang Soetomo sebagai berikut:

Pandangan Soetomo mengenai pembangunan masih berlaku dan perlu serta menguntungkan untuk mencoba membuat masyarakat (meskipun hal itu hanya terbatas kepada masyarakat Jawa — dalam pengertian yang paling sempit, masyarakat *priyayi*), sekuat mungkin dan keadaannya semantap mungkin, sehingga bila kemerdekaan tercapai, sudah ada suatu masyarakat yang sehat dan kuat untuk melaksanakan tugas-tugas menjadikan negeri ini baik dan mulia. Dalam pengertian ini, kita harus menghargai saran Soetomo supaya rakyat menyumbangkan apa saja yang dapat mereka sumbangkan dalam bidang

sendiri, demi terwujudnya kejayaan Indonesia. Seperti itulah sumbangan yang dianggapnya dapat dipersembahkan kepada rakyat dan bangsanya, membuat masyarakatnya dapat bertahan di bawah sistem apapun diharuskan hidup. Dengan cara ini, kita dapat melihat dalam perspektif yang lebih luas mengapa, bagi Soetomo, penting bekerja demi perwujudan kemuliaan bangsa, ketimbang demi kemerdekaan yang terbatas. Ia melihat tindakan-tindakannya dalam hubungan keuntungan-keuntungan jangka panjang, ketimbang menggulingkan pemerintahan asing secara langsung dengan segera. Kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat lebih penting bagi Soetomo, daripada konsep kemerdekaan yang abstrak dan samar (Scherer, 1985:256).

Pemikiran dan visi Soetomo itu terkait dengan dan mencerminkan semangat dan perkembangan zamannya. Namun, visi mampu melintasi waktu dan mengguratkan kearifan untuk dijadikan landasan dalam tindakan atau implementasinya. Visi dan semangat itu telah terwujud dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Dihadapkan pada kenyataan bahwa cita-cita itu belum sepenuhnya tampak pada kehidupan perekonomian bangsa Indonesia secara keseluruhan, karena

masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, perwujudan visi dan cita-cita luhur agar tak lekang ditelan zaman memerlukan pemaknaan dan penyesuaian dari masa ke masa, agar lebih memperlihatkan manfaatnya.

Bangsa Indonesia telah mengalami dinamika pertumbuhan dan perkembangan yang progresif melalui dan melampaui berbagai tantangan dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri (internal maupun eksternal). Perjuangan bangsa Indonesia belum selesai dan selalu tetap berlangsung, menyitir semangat pidato yang pernah dikumandangkan oleh salah seorang Bapak Pendiri Bangsa, yaitu Soekarno.<sup>7</sup> Hingga pada akhir abad ke-20, bangsa Indonesia berhasil menjalani suatu guncangan dan krisis total untuk memasuki suatu gerbang kehidupan bernegara dan berbangsa yang reformatif dalam nilai-nilai demokrasi yang lebih terbuka, desentralistik, dan dekonsentrik. Demokrasi dan otonomi daerah seperti itu merupakan pencapaian penting dari perjuangan Reformasi tahun 1998. Keberlangsungan cita-cita kemerdekaan memerlukan kehadiran sejumlah faktor yang menopang perkembangan menuju kemajuan (*progress*).

Selanjutnya, faktor-faktor yang memainkan peranan penting dalam mendorong kemajuan dan mempertahankan kelanggengan adalah: (1) Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam proses pergantian pemerintahan, prinsip demokrasi menjamin peralihan itu berlangsung penuh damai, dan prinsip ini dapat diterapkan pada bentuk pemerintahan, baik monarki maupun republik, yang berlandaskan pada konstitusi; (2) Penegakan hukum secara terus-menerus atau konsisten; (3) Kemampuan sumber daya manusia yang optimal, dimana kemampuan ini berkaitan dengan pemerataan pendidikan; (4) Penguasaan dan kemampuan inovasi teknologi; serta (5) Kemampuan mengembangkan ekonomi

<sup>7</sup>Perbandingan corak dan kiprah perjuangan Dokter Soetomo dengan Insinyur Soekarno dibahas oleh Peter Kasenda (2013).

secara berkesinambungan (Sastrosoenarto, 2006:69).

Selanjutnya, Hartarto Sastrosoenarto (2006) menyatakan bahwa kelima butir tersebut di atas menciptakan masyarakat yang inovatif, kreatif, dan produktif. Masyarakat seperti ini menjamin kelanggengan sebuah bangsa dalam gerak majunya, khususnya dalam lingkungan global yang semakin kompetitif.

## KESIMPULAN <sup>8</sup>

Indonesia berada di tengah-tengah perkembangan global yang membelah negara-negara ke dalam beberapa kategori, seperti negara maju, berkembang, dan terkebelakang. Hubungan antar bangsa, terutama dalam ranah ekonomi, memperlihatkan keadaan yang tidak seimbang (*unbalanced*) dan eksploitatif. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah serta ketersediaan sumber daya manusia, atau angkatan kerja, yang memadai, sehingga menjadi incaran dan sasaran negara-negara maju untuk memanfaatkan dan menjarah kekayaan tersebut.

Oleh karena itu, kesadaran global sudah semestinya mendorong semangat dan kemauan untuk mampu mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa maju di dunia, sebagaimana yang diserukan oleh Dokter Soetomo dalam gagasan, visi, dan konsepsi "Indonesia Mulia". Kemerdekaan politik tidak memiliki makna apabila tidak disertai dengan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi. Tujuan mulia itu diraih melalui kerja keras untuk mengangkat harkat dan bersama-sama dengan rakyat. Untuk itu, segala potensi bangsa, tidak hanya ekonomi namun juga non-ekonomi seperti modal sosial, perlu dikerahkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan.

<sup>8</sup>Versi awal karya ini disampaikan pada Diskusi Sejarah Pemikiran dan Perjuangan Dokter Soetomo di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, pada tanggal 5 Mei 2013. Judul menggunakan gelar "dokter" untuk membedakan dengan tokoh lainnya yang bernama sama, tetapi dengan sebutan terkenal yang berbeda, yaitu Bung Tomo, yang berperan penting dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Di balik gagasan yang melangkaui zaman itu, tersirat unsur-unsur pemikiran pembangunan ekonomi yang signifikan dan relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini yang sedang bangkit dari keterpurukan dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Perubahan moral ekonomi memerlukan dukungan dari berbagai faktor agar efisien, terarah, dan tepat sasaran, melalui pengerahan sumber daya bangsa yang menjadi modal sosial yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda pembangunan nasional dewasa ini. Namun, untuk memperoleh pemahaman dan kearifan yang komprehensif dan berdayaguna mengenai visi dan gagasan tokoh Soetomo ini memerlukan kajian pendalaman lanjutan yang kritis dan dialogis dalam dinamika intelektual yang interaktif dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya, selaras dengan semangat zaman.<sup>9</sup>

## Bibliografi

- Abdullah, Taufik. (2009). *Indonesia towards Democracy*. Singapore: ISEAS [Institute of South East Asian Studies].
- Abdullah, Taufik. (2012). "Bab 3: Dari Hasrat 'Kemajuan' ke Pembentukan Bangsa" dalam Taufik Abdullah & A.B. Lopian [eds]. *Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid 5: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI [Republik Indonesia], hlm.62-99.
- Abeyasekera, Susan. (1972). "Partai Indonesia Raja, 1936-1942: A Study in Cooperative Nationalism" dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol.3, No.2 [September], hlm.262-276.
- Anwar, Rosihan. (2009). *Sejarah Kecil: Petite Histoire Indonesia, Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Banoë, Pono. (2003). *Kamus Musik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Bellah, Robert N. (1992). *Religi Tokugawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Terjemahan.
- Boeke, J.H. (1983). *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan, Terjemahan.
- Burke, Peter. (2003). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan.
- Case, Karl E. & Ray C. Fair. (2007). *Prinsip-prinsip Ekonomi, Jilid I*. Jakarta: Penerbit Erlangga, Terjemahan, edisi ke-8.
- Christie, Clive J. (2001). *Ideology and Revolution in Southeast Asia, 1900-1980*. Richmond: Curzon Press.
- Dhont, Frank. (2005). *Nasionalisme Baru: Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Terjemahan.
- Dua, Mikhael. (2008). *Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, Terjemahan.
- Fakih, Farabi. (2012). "Conservative Corporatist, Nationalist Thoughts of Aristocrats: The Ideas of Soetatmo Soeriokoesoemo and Noto Soeroto" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol.168, No.4, hlm.420-444.
- Fukuyama, Francis. (1996). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press Paperbacks.
- Geertz, Clifford. (1983). *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, Terjemahan.
- Goto, Kenichi. (1998). *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan.
- Hasan, Umar, Dedy Irawan & Heru Kamarudin. (2008). "Ria: Modal Sosial Sistem Pemerintah Desa" dalam Hasantoha Adnan *et al.* [eds]. *Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*. Bogor: Penerbit CIFOR [Center for International Forestry Research].
- Hernawan, Wawan, Nina Herlina Lubis & Mumuh Muhsin Zakaria. (2014). "Ahmad Sanoesi, 1888-1950: The Leading Figure of *Al-Ittihadijatoel Islamijjah*" dalam *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, 6(1) October, hlm.67-82. Tersedia juga secara online di: [www.tawatikh-journal.com](http://www.tawatikh-journal.com)
- Ingelson, John. (1983). *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Kasenda, Peter. (2013). "Soetomo, Etnosentrisme, dan Natisentrisme" dalam Peter Kasenda, Yuda Tangkilisan & Djoko Marihandono [eds]. *Dokter Soetomo*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, hlm.1-115.
- Kasenda, Peter, Yuda Tangkilisan & Djoko Marihandono [eds]. (2013). *Dokter Soetomo*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Keraf, A. Sonny. (1996). *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Adam Smith*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kleden, Ignas. (2004). *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Jakarta: Yayasan Indonesiatara.
- Leirissa, R.Z. (1985). *Terwujudnya Suatu Gagasan: Sejarah Masyarakat Indonesia, 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Mulyana, Slamet. (2008). *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan, Jilid I*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Nagazumi, Akira. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme*

<sup>9</sup>**Pernyataan:** Dengan ini saya menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil penelitian dan pemikiran saya sendiri; jadi, ianya bukanlah hasil plagiat, karena sumber-sumber yang saya rujuk sangat jelas dinyatakan dalam Daftar Pustaka. Artikel ini juga belum direviu dan tidak dikirimkan kepada jurnal lain untuk diterbitkan. Saya bersedia menerima hukuman secara akademik apabila di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat ini tidak sesuai dengan kenyataan.

- Indonesia: Budi Utomo, 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan.
- Roxborough, Ian. (1990). *Teori-teori Keterbelakangan*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Sastrosoenarto, Hartarto. (2006). *Industrialisasi serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Scherer, Savitri Prastiti. (1985). *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Terjemahan.
- Scott, James. (1983). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Soetomo. (1982). "Pidato pada Kongres Parindra I" dalam Pitut Soeharto & A. Zainoel Ihsan [eds]. *Permata Terbenam: Capita Selecta Keempat*. Jakarta: Aksara Jayasakti.
- Sumarto, Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- van der Veur, Paul W. [ed]. (1984). *Kenang-kenangan Dokter Soetomo*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Weber, Max. (2007). *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Yogyakarta: Penerbit Jejak, Terjemahan.
- Wijaya, Daya Negri. (2013). "Mentalitas Pemuda pada Masa Pergerakan dan Masa Reformasi di Indonesia: Dari Berani Berpengetahuan hingga Takut Berpengetahuan" dalam *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, Vol.1, No.1 [Maret], hlm.75-84. Tersedia secara online juga di: [www.susurgalur-jksp.com](http://www.susurgalur-jksp.com)